



IKHTISAR EKSEKUTIF



Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja (*performance results*) dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan identifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan Indikator Kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan Indikator Kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang Kabupaten Pandeglang tahun 2020 dengan jumlah keseluruhan sasaran strategi sebanyak 2 (dua) sasaran dengan kategori capaian sasaran **Sangat Baik**. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Tahun 2020 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 dapat diselesaikan. Penyusunan LKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021.

Dengan telah tersusunnya LKIP ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak baik langsung dan tidak langsung yang telah banyak membantu secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2020 hingga selesainya penyusunan LKIP ini.

Penyusunan LKIP ini, diupayakan sebaik mungkin dan tidak luput dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi, namun demikian Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga LKIP ini telah dapat mencerminkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang yang telah dilaksanakan pada tahun 2020.

Pandeglang, Januari 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
SANDI DAN STATISTIK
KABUPATEN PANDEGLANG

Ir. GIRGIJANTORO

Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19620911 199003 1 007



DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 LATAR BELAKANG
- 1.2 DASAR HUKUM
- 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

- 2.1 RENSTRA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA SANDI
DAN STATISTIK
- 2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2020
- 2.3 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 PENGUKURAN KINERJA
- 3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA
- 3.3 KEUANGAN TAHUN 2020

BAB IV PENUTUP

- 4.1 PENGUKURAN KINERJA
- 4.2 UPAYA PEMECAHAN MASALAH

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

merupakan azas dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, yang dapat didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dapat diuraikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari lembaga kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan lembaga yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu.

Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang selanjutnya disingkat menjadi Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang yang keberadaan kelembagaannya yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat dan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik.

Lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang merupakan unsur pelaksana urusan komunikasi informasi, sandi dan statistik. Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang sebagai lembaga dalam pemerintahan harus tampil untuk dapat memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat serta dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan saran dan kritik untuk peningkatan Pembangunan di Wilayah Pandeglang. Oleh karenanya wewenang Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang akan selalu bersentuhan baik langsung maupun tidak langsung dengan masyarakat tentunya didukung dengan fungsi-fungsi yang menjadi kelancaran kinerjanya. Selain fungsi yang harus dijalankan guna pencapaian kinerja dan tujuan, dukungan dari Pemerintah Daerah pun harus diberikan, baik dalam segi teknis ataupun non teknis diantaranya adalah dukungan anggaran yang dialokasikan guna menopang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Penyusunan laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang sebagai instansi pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2020 sebagai upaya pengendalian agar kegiatan yang dilakukan tetap terarah kepada tujuan akhir yang akan dicapai. Selain bentuk pertanggungjawaban atas

wewenang yang diberikan, laporan ini merupakan evaluasi atas perencanaan yang telah disusun sebelumnya baik dalam sisi anggaran, rencana strategi, rencana kerja dan perencanaan lainnya. Sehingga laporan ini dapat dijadikan tolok ukur atas sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan yang menjadi suatu siklus pelaksanaan kinerja yang berjenjang, simultan dan akuntabel, selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang.

1.2 LANDASAN HUKUM

Keberadaan Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang serta pelaksanaan tugas dan kinerjanya berdasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kierja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 3 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rangkaian Musrenbang RKPD dan tatacara Penyusunan Rencana Kerja SKPD.
17. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD TA. 2020 tanggal 20 Oktober 2020;
19. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2020, tanggal 20 Oktober 2020;
20. Surat Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 903/07-PPKD/2020 tentang Pengesahan DPPA-SKPD TA. 2020, tanggal 21 Oktober 2020.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Satuan Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP adalah untuk mewujudkan Instansi Pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan mandat/amanat. Dengan demikian LKIP merupakan sarana bagi Instansi Pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima Instansi Pemerintah tersebut. Selain itu penyampaian LKIP kepada pihak yang berhak (secara hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain:

- a. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah kepada unit yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. LKIP ini lebih menonjolkan manajerialnya;
- b. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi;
- c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara singkat latar belakang yang berisikan gambaran umum Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang, landasan hukum pelaksanaan kinerja dan penyusunan laporan, maksud dan tujuan serta sistematika laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang rencana strategis, tujuan dan sasaran strategis, strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis, perencanaan kerja dan penetapan kinerja Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang tahun 2020.

BAB III KINERJA

Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan, kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Uraian singkat tinjauan umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja yang bersangkutan serta strategi pemecah masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA



2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA SANDI DAN STATISTIK KABUPATEN PANDEGLANG

Dalam sistem Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Renstra merupakan dasar bagi penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada. Renstra merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang akan dicapai selama periode 5 (lima) tahun, dengan memuat visi, misi dan sasaran yang akan dilaksanakan dengan strategi serta program /kegiatan pada tahun 2020.

Rencana strategis Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan dimulai dari tahun 2016 sampai dengan 2021, dengan berorientasi kepada hasil ingin dicapai melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tahun anggaran 2020 yang merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang.

2.1.3 Strategi dan Kebijakan

2.1.3.1 Strategi

Strategi merupakan cara dalam mencapai sasaran-sasaran strategi secara nyata yang menuntun pencapaian tujuan dan visi/misi dinas. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategi sebagaimana telah dirumuskan di atas serta dengan memperhitungkan faktor kekuatan/kelemahan dan peluang/ancaman yang ada, maka selanjutnya dirumuskan strategi dan kebijakan pembangunan bidang kominfosantik di kabupaten Pandeglang selama lima tahun mendatang (2016-2021), yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan aparat Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan;
2. Memfasilitasi kelancaran komunikasi dan informatika melalui penyediaan sarana dan prasarana yang mudah dan murah;
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi maupun antar wilayah terkait guna menciptakan sinergitas dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
4. Melaksanakan sosialisasi produk-produk di bidang kominfosantik;
5. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana kominfosantik sesuai perkembangan teknologi
6. Memperluas penyebaran komunikasi dan informasi ke setiap wilayah di Kabupaten Pandeglang
7. Membuka akses jasa pelayanan internet pemerintah daerah kepada masyarakat luas.

4.3.2 Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran

dan keterpaduan dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi.

Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang adalah :

1. Perwujudan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang antisipatif, adaptif dengan perkembangan lingkungan yang strategis, khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah;
2. Mendorong pembangunan sarana dan prasarana serta system jaringan komunikasi dan informasi yang berkualitas kepada masyarakat
3. Meningkatkan dan mengembangkan serta membangun jejaring, dan pelayanan jasa di bidang kominfisantik

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Rencana Kinerja tahun 2020 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra tahun 2016-2021 yang merupakan pelaksanaan lima tahunan. Pelaksanaan kinerja tahun 2020 harus sesuai dengan arah Renstra Kabupaten Pandeglang. Pelaksanaan kinerja tahun 2020 merupakan rencana kerja tahun pertama sesuai dengan pembentukan OPD Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang, merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi lembaga. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang sepenuhnya dapat ditunjukkan pada rencana kinerja tahun 2020 ini.

Kebijakan yang diambil dalam melaksanakan kinerja tahun 2020 adalah:

1. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran
2. Peningkatan, optimalisasi dan perawatan sarana prasarana kantor
3. Melakukan peningkatan dan pengembangan SDM personil
4. Pembangunan pusat media informasi berupa Ruang Pint@r Kabupaten Pandeglang

5. Penyebaran informasi dan data kepada masyarakat serta jejaring kerja sama

6. Evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan

Dari kebijakan yang telah ditetapkan di atas, maka sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dilapangan, maka ditentukanlah 4 (empat) Program dan 22 Kegiatan dengan rincian tersebut di bawah ini :

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
A	Program Layanan Dasar Perangkat Daerah	140.911.700,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD	5.450.000,00
2	Penyusunan Rencana Kinerja OPD	-
3	Penyusunan Laporan Keuangan	4.185.000,00
4	Penyusunan Laporan Kinerja	-
5	Penyusunan Laporan BMD	3.755.000,00
6	Pengadaan Barang Unit	15.156.000,00
7	Pemeliharaan Barang Unit	13.546.000,00
8	Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor	14.780.000,00
9	Peningkatan Kapasitas Aparatur	-
10	Pengadaan Jasa Kantor	84.039.700,00
B	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2.727.242.663,00
1	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan dan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	2.400.000,00
2	Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi	194.400.000,00
3	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	444.176.280,00
5	Pemberdayaan Pengembangan Kelompok	10.000.000,00

	Informasi Masyarakat (KIM)	
6	Publikasi dan Dokumentasi	23.800.000,00
7	Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal	22.266.383,00
8	Penerapan E-Government	30.900.000,00
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kominfo dan Statistik	1.999.300,000,00
C	Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	106.800.000,00
1	Pengolahan dan Analisis Data Statistik Daerah	69.500.000,00
2	Inventarisasi Data Pembangunan	37.300.000,00
3	Pengelolaan Sistem Data Statistik Pembangunan Daerah	-
D	Program Tata kelola Persandian Daerah	3.750.000,00
1	Peningkatan dan Pengembangan Persandian Daerah	3.750.000,00
	JUMLAH	2.978.704.363,00

2.3 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020

Penetapan kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang tahun 2020 yang mengacu pada rencana strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2016-2021. Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang untuk tahun 2020 tertera pada lampiran 1.

A. RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Sasaran			Program	Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tk. Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tk.Capaian (Target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terselenggaranya layanan dasar perangkat daerah	Terpenuhinya layanan dasar perangkat daerah	100%	Program Layanan Dasar Perangkat Daerah				140.911.700,00	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD	Masukan Keluaran Hasil	Rp. %	5.450.000,00 Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun 100	
				Penyusunan Rencana Kinerja OPD	Masukan Keluaran Hasil	Rp. %	- Jumlah dokumen rencana kinerja yang tersusun -	
				Penyusunan Laporan Keuangan	Masukan Keluaran Hasil	Rp. %	4.185.000,00 Jumlah Dokumen laporan keuangan yang tersusun 100	
				Penyusunan Laporan Kinerja	Masukan Keluaran Hasil	Rp. %	- Jumlah laporan kinerja yang disusun -	
				Penyusunan Laporan BMD	Masukan Keluaran Hasil	Rp. %	3.755.000,00 Jumlah dokumen laporan asset/BMD yang tersusun 100	
				Pengadaan Barang Unit	Masukan Keluaran Hasil	Rp. %	15.156.000,00 Tersedianya pengadaan barang unit 10 jenis 100	
				Pemeliharaan Barang Unit	Masukan Keluaran Hasil	Rp. %	13.546.000,00 Jumlah barang unit yang terpelihara 100	
				Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor	Masukan Keluaran	Rp.	14.780.000,00 Jumlah gedung/bangunan yang terpelihara	

					Hasil	%	100	
				Peningkatan Kapasitas Aparatur	Masukan Keluaran Hasil	Rp. %	- Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek -	
				Pengadaan Jasa Kantor	Masukan Keluaran Hasil	Rp %	84.039.700,00 Tersedianya layanan jasa kantor 12 bulan 100	
Meningkatnya Inovasi Daerah	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di daerah	100%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				2.727.242.663,00	
				Pembinaan dan Pengembangan Jaringan dan sumber daya komunikasi dan informasi	Masukan Keluaran Hasil	Rp. %	2.400.000,00 Jumlah Pembinaan dan pengembangan jaringan dan sumber daya komunikasi dan informasi yang tersedia 100	
				Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Masukan Keluaran Hasil	Rp. %	194.400.000,00 Terbangunnya jangkauan informasi dan komunikasi yang meningkat 6 langganan 100	
				Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Masukan Keluaran Hasil	Rp. %	444.176.280,00 Tersebarluaskannya informasi pembangunan dan iklan ucapan melalui media massa yang tersedia serta terselenggaranya jumpa pers 12 bulan 100	
				Pemberdayaan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Masukan Keluaran Hasil	Rp %	10.000.000,00 Terlaksananya kegiatan pemberdayaan KIM Desa 100	
				Publikasi dan Dokumentasi	Masukan Keluaran	Rp.	23.800.000,00 Terlaksananya liputan kegiatan pemerintah daerah 12 bulan	

					Hasil	%	100	
				Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal	Masukan Keluaran Hasil	Rp. %	22.266.383,00 Tersedianya layanan operasional LPPL Radio Berkah 12 bulan 100	
				Penerapan E-Government	Masukan Keluaran Hasil	Rp. %	30.900.000,00 Terlaksananya OPD yang menerapkan E-Government 2 kegiatan 100	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Kominfo dan Statistik	Masukan Keluaran Hasil	Rp. %	1.999.300.000,00 Terlaksananya peralatan dan kelengkapan instalasi jaringan LAN 1 kegiatan 30	
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Pemerintah Daerah	100%	Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah				106.800.000,00	
				Pengolahan dan Analisis Data Statistik Daerah	Masukan Keluaran Hasil	Rp. %	69.500.000,00 Tersusunnya Pengolahan dan Analisis Data Statistik Daerah 6 buku 100	
				Inventarisasi Data Pembangunan	Masukan Keluaran Hasil	Rp. %	37.300.000,00 Tersusunnya Data Statistik Pembangunan 5 kegiatan 100	
				Pengelolaan Sistem Data Statistik Pembangunan Daerah	Masukan Keluaran Hasil	Rp. %	- Terkelolanya system data statistik pembangunan daerah 2 kegiatan -	
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Perangkat daerah yang telah	100%	Program Tata Kelola Persandian	Peningkatan dan Pengembangan Persandian Daerah	Masukan Keluaran	Rp	3.750.000,00 Jumlah Dokumen diterima melalui Sanapati	

	menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah		Daerah		Hasil		100%	
--	--	--	---------------	--	-------	--	------	--

B. PENETAPAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA SANDI DAN STATISTIK KABUPATEN PANDEGLANG

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	OUTCOME	ANGGARAN
			TARGET		TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Terlaksananya pengembangan komunikasi informasi dan media massa	100%			2.727.242.663,00
	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan dan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah Pembinaan dan pengembangan jaringan dan sumber daya komunikasi dan informasi yang tersedia	1 kegiatan PPID	Jumlah Pembinaan dan pengembangan jaringan dan sumber daya komunikasi dan informasi yang tersedia	1 kegiatan PPID	2.400.000,00
	Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Terbangunnya jangkauan informasi dan komunikasi yang meningkat 6 langganan	1 Layanan	Terbangunnya jangkauan informasi dan komunikasi yang meningkat 6 langganan	1 Layanan	194.400.000,00
	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Tersebarluaskannya informasi pembangunan dan iklan ucapan melalui media massa yang tersedia serta terselenggaranya jumpa pers 12 bulan	12 bulan	Tersebarluaskannya informasi pembangunan dan iklan ucapan melalui media massa yang tersedia serta terselenggaranya jumpa pers 12 bulan	12 bulan	444.176.280,00
	Pemberdayaan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan KIM Desa	1 kegiatan (Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat)	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan KIM Desa	1 kegiatan (Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat)	10.000.000,00
	Publikasi dan Dokumentasi	Terlaksananya liputan kegiatan pemerintah daerah	12 bulan	Terlaksananya liputan kegiatan pemerintah daerah	12 bulan	23.800.000,00

	Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal	Tersedianya layanan operasional LPPL Radio	12 bulan	Tersedianya layanan operasional LPPL Radio	12 bulan	22.266.383,00
	Penerapan E-Government	Terlaksananya OPD yang menerapkan E-Government 2 kegiatan	1 kegiatan	Terlaksananya OPD yang menerapkan E-Government 2 kegiatan	1 kegiatan	30.900.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kominfo dan Statistik	Terlaksananya peralatan dan kelengkapan instalasi jaringan LAN 1 kegiatan	100%	Terlaksananya peralatan dan kelengkapan instalasi jaringan LAN 1 kegiatan	100%	1.999.300.000,00
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh Informasi Pembangunan	Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	Terlaksananya pengembangan data / informasi dan statistik daerah	100%			106.800.000,00
	Pengolahan dan Analisis Data Statistik Daerah	Tersusunnya Pengolahan dan Analisis Data Statistik Daerah 6 buku	3 Dokumen	Tersusunnya Pengolahan dan Analisis Data Statistik Daerah 6 buku	3 Dokumen	69.500.000,00
	Inventarisasi Data Pembangunan	Tersusunnya Data Statistik Pembangunan 5 kegiatan	2 Kegiatan Inventarisasi dan Pengumpulan Data : 1 Makro Ekonomi 2. Makro Sosial Budaya)	Tersusunnya Data Statistik Pembangunan 5 kegiatan	2 Kegiatan Inventarisasi dan Pengumpulan Data : 1 Makro Ekonomi 2. Makro Sosial Budaya)	37.300.000,00
	Pengelolaan Sistem Data Statistik Pembangunan Daerah	Terkelolanya system data statistik pembangunan daerah 2 kegiatan	-	Terlaksana kegiatan inventarisasi dan pengumpulan Data	-	-
Terimplementasikan ya E-Government	Program Tata Kelola Persandian Daerah	Terlaksananya pengembangan data / informasi dan statistik daerah	100%			3.750.000,00

	Peningkatan dan Pengembangan Persandian Daerah	Jumlah dokumen diterima melalui sanapati	1 Dokumen	Jumlah dokumen diterima melalui sanapati	1 Dokumen	3.750.000,00
--	--	--	-----------	--	-----------	--------------

Secara umum kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2020 dapat dikatakan berhasil dicapai, akan tetapi dalam perjalanan pelaksanaannya terdapat hambatan yang bersifat teknis atau non teknis. Hambatan tersebut ditemukan dalam internal ataupun eksternal kantor yang tidak dapat diprediksikan, seperti adanya perubahan anggaran pemerintah daerah, rotasi/mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah, faktor waktu dan perubahan harga barang yang fluktuatif. Oleh karenanya target kinerja yang ditetapkan tidak 100% tercapai.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Penyampaian kinerja merupakan perwujudan dari capaian kinerja secara menyeluruh dari Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang kinerja yang dicapai merupakan hasil kontribusi dari seluruh jajaran serta hasil dari implementasi program dan kegiatan selama tahun 2020. Penyajian Indikator ini dapat dijadikan masukan dalam mengevaluasi kinerja makro pembangunan, sekaligus sebagai bahan pertimbangan apakah kebijakan publik yang dijalankan selama ini telah sesuai dengan Renstra Kabupaten Pandeglang tahun 2016-2021, Sedangkan uraian pencapaian sasaran strategis merupakan hasil akhir pelaksanaan program dan kegiatan unit kerja guna mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Untuk mengukur capaian kinerja sasaran tahun tersebut digunakan metodologi pengukuran pencapaian kinerja sesuai dengan *assesment*). Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2020 membandingkan antara target pencapaian Indikator Kinerja realisasinya, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran kordinal sebagai berikut :

Klasifikasi nilai	Prediksi
Lebih dari 90%	: Sangat baik
Lebih dari 80% - 90	: Baik
Lebih dari 70% - 80	: Sedang
Lebih dari 60% - 70	: Kurang Baik
Kurang dari 60%	: Buruk

Oleh karenanya perhitungan dalam analisis kinerja yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang atas kinerja dan keuangan didasarkan pada perhitungan tersebut di atas.

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan secara mandiri. Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang.

Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh Indikator Kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Program Layanan Dasar Perangkat Daerah		Terpenuhinya Layanan Dasar Perangkat Daerah			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD	Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100
2	Penyusunan Rencana Kinerja OPD	Jumlah dokumen rencana kinerja yang tersusun	-	-	-
3	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen laporan keuangan yang tersusun	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	100
4	Penyusunan Laporan Kinerja	Jumlah laporan kinerja yang disusun	-	-	-
5	Penyusunan Laporan BMD	Jumlah dokumen laporan asset/BMD yang tersusun	1 Jenis Laporan BMD	1 Jenis Laporan BMD	100
6	Pengadaan Barang Unit	Tersedianya pengadaan barang unit	7 Jenis	7 Jenis	100
7	Pemeliharaan Barang Unit	Jumlah barang unit yang terpelihara	7 Unit	7 Unit	100
8	Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor	Jumlah gedung/bangunan yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	100
9	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek	-	-	-
10	Pengadaan Jasa Kantor	Tersedianya layanan jasa kantor	12 Bulan	12 Bulan	100
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		Terlaksananya Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa			
1	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan dan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Jumlah Pembinaan dan pengembangan jaringan dan sumber daya komunikasi dan informasi yang tersedia	1 Kegiatan PPID	1 Kegiatan PPID	100
2	Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan jaringan komunikasi dan informasi	Terbangunnya jangkauan informasi dan komunikasi yang meningkat	1 Layanan	1 Layanan	100
3	Penyebarluasan	Tersebarluaskannya	12 Bulan	12 Bulan	100

	informasi pembangunan daerah	informasi pembangunan dan iklan ucapan melalui media massa yang tersedia serta terselenggaranya jumpa pers			
4	Pemberdayaan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan KIM Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
5	Publikasi dan Dokumentasi	Terlaksananya liputan kegiatan pemerintah daerah	12 Bulan	12 Bulan	100
6	Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal	Tersedianya layanan operasional LPPL Radio Berkah	12 Bulan	12 Bulan	100
7	Penerapan E-Government	Terlaksananya OPD yang menerapkan E-Gogernment	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kominfo dan Statistik	Terlaksananya peralatan dan kelengkapan instalasi jaringan LAN	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah		Terlaksananya Pengembangan Data/Informasi dan Statistik Daerah			
1	Pengolahan dan Analisis Data Statistik Daerah	Tersusunnya Pengolahan dan Analisis Data Statistik Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100
2	Inventarisasi Data Pembangunan	Tersusunnya Data Statistik Pembangunan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100
3	Pengelolaan Sistem Data Statistik Pembangunan Daerah	Terkelolanya system data statistik pembangunan daerah	-	-	-
Program Tata Kelola Persandian Daerah		Terlaksananya Koordinasi keamanan Sistem Informasi ke BSSN			
1	Peningkatan dan Pengembangan Persandian Daerah	Terlaksananya koordinasi keamanan sistem informasi ke BSSN	1 Dokumen	1 Dokumen	100

3.3 KEUANGAN TAHUN 2020

Pada tahun anggaran 2020 Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang, memiliki anggaran sebesar Rp. **4.182.383.572,17** setelah perubahan memiliki anggaran Rp. **2.665.038.876,91** yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, dengan rincian :

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.182.383.572,17	2.665.038.876,91
BELANJA LANGSUNG	4.226.650.000,00	2.978.704.363,00
JUMLAH	8.409.033.572,17	5.643.743.239,91

Dalam keuangan yang akan disajikan Realisasi APBD yang berada pada Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang tahun 2020 dihitung berdasarkan Anggaran yang telah dilakukan perubahan, yaitu sebesar Rp. **2.978.704.363,00** dari pagu anggaran perubahan Rp. **5.643.743.239,91** atau capaian sebesar **98,24 %**. Capaian tersebut tidak merupakan nilai yang sangat memuaskan karena menurut sistem penilain sendiri (*self assesment*) sebagaimana telah dijelaskan di atas, nilai tersebut masuk dalam predikat **Sangat Baik**.

Adapun rincian anggaran realisasi per-kegiatan dan keuangan dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.665.038.876,91	2.581.266.868,00	83.772.008,91	96.86
Belanja Pegawai	2.665.038.876,91	2.581.266.868,00	83.772.008,91	96.86
Belanja Gaji dan Tunjangan	1.532.475.450,91	1.476.539.368,00	55.936.082,91	96.35
Gaji Pokok PNS/Bupati/Wakil Bupati/DPRD/ Uang	1.125.062.565,31	1.085.023.120,00	40.039.445,31	96.44

Representasi				
Tunjangan Keluarga	137.046.880,80	133.188.088,00	3.858.792,80	97.18
Tunjangan Jabatan	168.164.362,50	163.825.000,00	4.339.362,50	97.42
Tunjangan Fungsional Umum	18.892.112,50	15.515.000,00	3.377.112,50	82.12
Tunjangan Beras	71.563.943,70	67.785.120,00	3.778.823,70	94.72
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.405.508,78	2.245.310,00	160.198,78	93.34
Pembulatan Gaji	16.106,17	14.453,00	1.653,17	89.74
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.132.563.426,00	1.104.727.500,00	27.835.926,00	97.54
Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	-	-	-	-
Tambahan Penghasilan berdasarkan obyektif lainnya	1.132.563.426,00	1.104.727.500,00	27.835.926,00	97.54
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi PNSD	2.330.989,03	2.235.814,00	95.175,03	95.92
Belanja luran Jaminan Kematian (JKM) bagi PNSD	6.992.982,12	6.707.463,00	285.519,12	95.92
BELANJA LANGSUNG	2.978.704.363,00	2.926.167.781,00	52.536.582,00	98.24
Program Layanan Dasar Perangkat Daerah	140.911.700,00	130.584.383,00	10.327.317,00	92.67
Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD	5.450.000,00	5.450.000,00	-	100.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	-	100.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan NON PNS	750.000,00	750.000,00	-	100.00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pen ceramah Agama	800.000,00	800.000,00	-	100.00
Notulen	150.000,00	150.000,00	-	100.00
Belanja Photocopy	-	-	-	-
Belanja Penjilidan	-	-	-	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100.00
Penyusunan Rencana Kinerja OPD	-	-	-	-
Belanja Photocopy	-	-	-	-
Belanja Penjilidan	-	-	-	-
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pen ceramah Agama	-	-	-	-

Moderator	-	-	-	-
Notulen	-	-	-	-
Belanja Photocopy	-	-	-	-
Belanja Penjilidan	-	-	-	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat/kegiatan	-	-	-	-
Penyusunan Laporan Keuangan	4.185.000,00	4.185.000,00	-	100.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	3.150.000,00	-	100.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	750.000,00	750.000,00	-	100.00
Belanja Photocopy	150.000,00	150.000,00	-	100.00
Belanja Penjilidan	135.000,00	135.000,00	-	100.00
Penyusunan Laporan Kinerja	-	-	-	-
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	-	-	-
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	-	-	-	-
Belanja Photocopy	-	-	-	-
Penyusunan Laporan BMD	3.755.000,00	3.755.000,00	-	100.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.060.000,00	3.060.000,00	-	100.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	600.000,00	600.000,00	-	100.00
Belanja Photocopy	50.000,00	50.000,00	-	100.00
Belanja Penjilidan	45.000,00	45.000,00	-	100.00
Pengadaan Barang Unit	15.156.000,00	14.622.000,00	534.000,00	96.48
Belanja alat tulis kantor	4.895.000,00	4.895.000,00	-	100.00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	300.000,00	300.000,00	-	100.00
Belanja Spanduk Baliho, Billboard, Papan Nama/Plang dan sejenisnya	1.500.000,00	1.150.000,00	350.000,00	76.67
Belanja Cetak	2.075.000,00	2.075.000,00	-	100.00
Belanja Photocopy	786.000,00	786.000,00	-	100.00
Belanja Alat dapur	600.000,00	600.000,00	-	100.00
Belanja modal pengadaan alat penyimpanan perlengkapan kantor	-	-	-	-
Belanja modal pengadaan alat elektronik	-	-	-	-
Belanja modal pengadaan alat pendingin	-	-	-	-

Belanja modal pengadaan Komputer unit/jaringan	-	-	-	-
Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	-	-	-	-
Pemeliharaan Barang Unit	13.546.000,00	13.260.400,00	285.600,00	97.89
Belanja Jasa Service	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100.00
Belanja Suku Cadang	3.360.000,00	3.360.000,00	-	100.00
Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	4.180.000,00	4.180.000,00	-	100.00
Belanja Pajak/Bukan Pajak kendaraan bermotor	2.906.000,00	2.620.400,00	285.600,00	90.17
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.150.000,00	1.150.000,00	-	100.00
Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor	14.780.000,00	14.780.000,00	-	100.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	-	-	-	-
Honorarium Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	-	-	-	-
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.780.000,00	14.780.000,00	-	100.00
Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	-	-	-
Belanja perjalanan dinas luar daerah	-	-	-	-
Pengadaan Jasa Kantor	84.039.700,00	74.531.983,00	9.507.717,00	88.69
Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	15.469.200,00	14.682.000,00	787.200,00	94.91
Honorarium Kebersihan Kantor Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100.00
Honorarium Keamanan Kantor Non PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100.00
Belanja Jasa Rekening Telepon	-	-	-	-
Belanja Jasa Rekening Listrik	20.400.000,00	13.499.983,00	6.900.017,00	66.18
Belanja surat kabar/majalah	5.119.700,00	4.900.000,00	219.700,00	95.71
Belanja JKK dan JKM PPBASN	400.800,00	-	400.800,00	-
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100.00
Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100.00
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2.727.242.663,00	2.685.033.398,00	42.209.265,00	98.45
Pembinaan dan pengembangan jaringan dan sumber daya komunikasi dan informasi	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	-	-	-

Honorarium Perangkat Pertandingan/Perlombaan	-	-	-	-
Honorarium Pengelola Sistem Informasi, Website dan jaringan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	-	-	-	-
Honorarium Pengelola Sistem Informasi, Website dan jaringan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100.00
Belanja Spanduk, baliho, Billboard, Papan Nama/Plang dan sejenisnya	-	-	-	-
Belanja plakat/piala/trophy/Piagam/Karangan bunga	-	-	-	-
Belanja Seminar KIT	-	-	-	-
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	-	-	-	-
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penceramah Agama	-	-	-	-
Moderator	-	-	-	-
Notulen	-	-	-	-
Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Doa	-	-	-	-
Belanja Penggandaan	-	-	-	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan	-	-	-	-
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	-	-	-
Belanja perjalanan dinas luar daerah	-	-	-	-
Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan jaringan komunikasi dan informasi	194.400.000,00	194.400.000,00	-	100.00
Belanja Jasa kawat/faksimili/internet	194.400.000,00	194.400.000,00	-	100.00
Belanja perjalanan dinas luar daerah	-	-	-	-
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	444.176.280,00	444.126.280,00	50.000,00	99.99
Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	800.000,00	800.000,00	-	100.00
Belanja Spanduk Baliho, Billboard, Papan Nama/Plang dan sejenisnya	-	-	-	-
Belanja jasa iklan	382.500.000,00	382.450.000,00	50.000,00	99.99
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	-	-	-	-

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penceramah Agama	6.500.000,00	6.500.000,00	-	100.00
Moderator	500.000,00	500.000,00	-	100.00
Notulen	400.000,00	400.000,00	-	100.00
Belanja Jasa Pembawa Acara (MC)/Pembaca doá	600.000,00	600.000,00	-	100.00
Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.776.280,00	35.776.280,00	-	100.00
Belanja uang Pengganti transport	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100.00
Pemberdayaan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	-	-	-
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS.	-	-	-	-
Belanja Spanduk Baliho, Billboard, Papan Nama/Plang dan sejenisnya	-	-	-	-
Belanja jasa kebersihan/Cleaning Service	-	-	-	-
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penceramah Agama	-	-	-	-
Moderator	-	-	-	-
Notulen	-	-	-	-
Belanja Jasa Pembawa Acara (MC)/Pembaca doá	-	-	-	-
Belanja Penggandaan	-	-	-	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat/kegiatan	-	-	-	-
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	-	-	-
Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100.00
Publikasi dan Dokumentasi	23.800.000,00	23.800.000,00	-	100.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS.	1.350.000,00	1.350.000,00	-	100.00
Honorarium Pengelola Sistem Informasi, Website, dan jaringan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100.00
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery	100.000,00	100.000,00	-	100.00

kering)				
Belanja Plakat/Piala/Tropy/Piagam/Karangan Bunga	-	-	-	-
Belanja Jasa Lainnya	-	-	-	-
Belanja Photocopy	-	-	-	-
Belanja pakaian kerja lapangan	-	-	-	-
Belanja kelengkapan/Atribut pakaian kerja	-	-	-	-
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.800.000,00	11.800.000,00	-	100.00
Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.550.000,00	4.550.000,00	-	100.00
Belanja pemeliharaan asset tetap lainnya	-	-	-	-
Belanja modal Pengadaan Film bergerak dan rekaman Video	-	-	-	-
Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal	22.266.383,00	21.766.383,00	500.000,00	97.75
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS.	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100.00
Belanja Jasa Sertifikasi	6.466.383,00	6.466.383,00		100.00
Belanja Jasa Lainnya	-	-	-	-
Belanja pakaian kerja lapangan	-	-	-	-
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	-	-	-
Belanja perjalanan dinas luar daerah	-	-	-	-
Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	5.000.000,00	4.500.000,00	500.000,00	90.00
Belanja Modal pengadaan computer unit/jaringan	-	-	-	-
Belanja modal pengadaan peralatan Pemancar HF/SW	-	-	-	-
Belanja Modal pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM	-	-	-	-
Penerapan E-Government	30.900.000,00	30.619.700,00	280.300,00	99.09
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16300000.00	16300000.00	-	100.00
Honorarium Pengelola Sistem Informasi, Website dan Jaringan	14.400.000,00	108800000.00	-	100.00
Belanja Jasa Kawat/faksimili/internet	14.500.000,00	14.219.700,00		100.00

Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kominfo dan Statistik	1.999.300.000,00	1.957.921.035,00	41.378.965,00	97.93
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	-	-	-	-
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-
Honorarium Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	-	-	-	-
Belanja Jasa Kawat/faksimili/internet	19.500.000,00	19.500.000,00	-	100.00
Belanja Jasa Instalasi	100.000.000,00	96.015.000,00	3.985.000,00	96.02
Belanja Modal Pengadaan Printer dan Scanner	64.000.000,00	62.001.000,00	1.999.000,00	96.88
Belanja Modal Pengadaan Alat Elektronik	435.350.000,00	417.553.100,00	17.796.900,00	95.91
Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	380.000.000,00	370.000.000,00	10.000.000,00	97.37
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	129.750.000,00	129.000.000,00	750.000,00	99.42
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	829.700.000,00	824.196.435,00	5.503.565,00	99.34
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio	41.000.000,00	39.655.500,00	1.344,500,00	96.72
Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	106.800.000,00	106.800.000,00	-	100.00
Pengelolaan Sistem Data Statistik Pembangunan Daerah	-	-	-	-
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	-	-	-
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS.	-	-	-	-
Belanja Spanduk Baliho, Billboard, Papan Nama/Plang dan sejenisnya	-	-	-	-
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pen ceramah Agama	-	-	-	-
Moderator	-	-	-	-
Notulen	-	-	-	-
Belanja Photocopy	-	-	-	-
Belanja sewa gedung/kantor/tempat	-	-	-	-
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan	-	-	-	-
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	-	-	-
Belanja perjalanan dinas luar	-	-	-	-

daerah				
Pengolahan dan Analisa Data Statistik Daerah	69.500.000,00	69.500.000,00	-	100.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	-	-	-
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS.	-	-	-	-
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penceramah Agama	-	-	-	-
Moderator	-	-	-	-
Notulen	-	-	-	-
Belanja Jasa lainnya	69.500.000,00	69.500.000,00	-	100.00
Belanja Penggandaan	-	-	-	-
Belanja Photocopy	-	-	-	-
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan	-	-	-	-
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	-	-	-
Belanja perjalanan dinas luar daerah	-	-	-	-
Inventarisasi Data Pembangunan	37.300.000,00	37.300.000,00	-	100.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	-	-	-
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS.	-	-	-	-
Belanja seminar KIT	-	-	-	-
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penceramah Agama	-	-	-	-
Moderator	-	-	-	-
Notulen	-	-	-	-
Belanja Jasa lainnya	37.300.000,00	37.300.000,00	-	100.00
Belanja Cetak	-	-	-	-
Belanja Photocopy	-	-	-	-
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan	-	-	-	-
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	-	-	-
Belanja perjalanan dinas luar daerah	-	-	-	-
Program Tata Kelola Persandian Daerah	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100.00

Peningkatan dan Pengembangan Persandian Daerah	3.750.000,00	3.750.000,00	-	100.00
Honorarium Pengelola Sistem Informasi, Website dan Jaringan	750.000,00	750.000,00	-	100.00
Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100.00
JUMLAH	2.978.704.363,00	2.926.167.781,00	52.536.582,00	98.24



BAB IV PENUTUP



4.1 PENGUKURAN KINERJA

Penyusunan LKIP Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2020 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai Pencapaian target Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan.

4.2 UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Problematika perencanaan pembangunan senantiasa berkembang yang merupakan tantangan bagi Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan daerah yang diemban oleh Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan dimasa mendatang, melalui :
 - a. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencana;

- b. Memberikan kemudahan bagi aparaturnya untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
 - c. Mengupayakan penerapan “reward dan punishment” secara proporsional;
 - d. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan;
 - e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/ anggaran dari pola “top down” menjadi “bottom up” sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.
 3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun anggaran dan perkembangan masalah masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan.
 4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
 5. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan

melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan *civil society*.

Demikian LKIP Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang tahun 2020, semoga dapat memberikan informasi dan pertanggungjawaban tentang keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada seluruh pihak terkait, yang pada akhirnya dapat memberikan masukan-masukan sebagai umpan balik (*feed back*) yang akan dijadikan bahan evaluasi kinerja sehingga dapat menentukan perubahan-perubahan dan perbaikan yang diperlukan serta untuk membuat strategi pemecahan masalah guna memperbaiki keadaan yang lebih baik untuk tahun yang akan datang.